

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang terletak di benua Asia bagian Tenggara yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Indonesia memiliki penduduk sebanyak 252 juta jiwa dengan luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.919.440 km². Dengan luas wilayah yang begitu besar dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang banyak, perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno mengalami keterpurukan dan Indonesia mengalami inflasi yang tinggi, hal ini dikarenakan pemikiran pada saat itu lebih didominasi oleh politik.

Saat pergantian kepemimpinan, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan walaupun pada saat itu dibawah kepemimpinan militer. Hal ini disebabkan Indonesia menganut sistem liberal yang dimana pemimpin pada saat itu berusaha mendorong masuknya investasi asing sebanyak mungkin ke Indonesia untuk mendorong perekonomian dan membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang banyak, Indonesia tumbuh sebagai salah satu negara berkembang yang layak dijadikan tempat penanaman modal. Indonesia menyadari pentingnya investasi langsung asing dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian negaranya. Kemudian Indonesia mulai memberlakukan Undang-

Undang tentang Penanaman Modal Asing yaitu UU no. 1 tahun 1967 untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional dan sekarang telah dirubah menjadi UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, investasi asing mulai berdatangan ke Indonesia.¹

Korea Selatan merupakan negara yang merdeka pada tahun 15 agustus 1948 dan memiliki wilayah seluas 98.344 km² serta penduduknya lebih dari 50 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan sempitnya tanah, tingkat kepadatan di Korea Selatan menduduki urutan ke-3 di seluruh dunia.² Awalnya Korea Selatan merupakan negara yang tertutup dan dijauhkan dari pergaulan internasional. Pada saat perang Korea terjadi di tahun 1950, Korea Selatan mengalami kehancuran dan membuat perekonomian Korea memburuk. Akan tetapi di tahun 1962, Korea Selatan bangkit dengan mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang dipacu oleh ekspor serta mulai terlibat aktif dalam perdagangan internasional. Dan hingah saat ini Korea Selatan dikenal kedalam kategori negara maju.

Menurut kaum Liberal sebuah negara akan menjalin kerjasama karena seiring berjalannya waktu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi telah menghasilkan interdependensi antar negara.³ Dan realita yang terjadi sekarang banyaknya negara-negara yang menjalin kerjasama internasional baik itu

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf>, diakses 8 oktober 2015

² James Hoares dan Susan Pares, Korea: An Introduction (London & New York: Kegan Paul International, 1998), hal 6

³ Jill Steans & Lloyd Pettiford, Hubungan Internasional Perspektif & Tema (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 132

bilateral, regional maupun multilateral untuk terciptanya suatu negara yang yang sejahtera.

Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin hubungan lebih dari empat dasawarsa sejak dibukanya hubungan diplomatik tahun 1973. Selama empat dasawarsa ini, hubungan ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan tidak sepenuhnya bersifat ekonomi. Sifat pemerintah sangat mempengaruhi hubungan ekonomi kedua negara. Pada saat Indonesia dan Korea Selatan dibawah pemerintah militeris, dan sebagai negara yang berkembang kedua pemerintah ingin meningkatkan kondisi perekonomian nasionalnya.⁴

Korea Selatan merupakan negara penting bagi Indonesia hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai investasi dari tahun ketahun. Hubungan kedua negara dalam bidang investasi dimulai pada tahun 1960-an yang dimana, Indonesia merupakan negara pertama tempat perusahaan Korea Selatan menanamkan modalnya pada pengembangan industri. Total investasi Indonesia dari Korea Selatan pada 1980 sebesar 40,6 persen atau senilai USD 38 juta. Nilai realisasi investasi Korea di Indonesia terus meningkat. Hingga tahun 1997 akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia termasuk Indonesia dan Korea Selatan, hubungan kedua negara menjadi renggang dan menurunnya nilai investasi, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pergantian kepemimpinan yang awalnya pemerintahan berbasis militer menjadi pemerintahan sipil.

⁴ Yang Seung-Yoon, 40 tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia – Korea Selatan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

Semenjak krisis 1997 berakhir, banyak negara-negara di Asia bangkit dari keterpurukan. Contohnya seperti di Korea Selatan terjadi kebangkitan dari krisis yang ditandai dengan mulai bergerakinya sektor-sektor industri dan investasi. Sedangkan di Indonesia sendiri mulai membuka peluang yang sebesar-besarnya agar investasi masuk ke Indonesia.

Akibat dari pasang surutnya hubungan kerjasama antara Indonesia-Korea Selatan, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan di bidang ekonomi. Peningkatan hubungan di bidang ekonomi ini ditunjukkan dengan kedua presiden Indonesia-Korea Selatan menandatangani *the Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* di Jakarta pada tanggal 4-5 desember 2006.⁵ Sebenarnya deklarasi ini merupakan realisasi dari hubungan bilateral FTA Korea Selatan dan ASEAN di tahun 2006. Dalam deklarasi tersebut kedua negara mengharapkan hal ini menjadi momentum untuk perkembangan lebih lanjut dalam hubungan Indonesia-Korea Selatan, khususnya dibidang investasi.

Hubungan Indonesia dan Korea Selatan merupakan hubungan yang bersifat saling melengkapi. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, kapasitas tenaga kerja yang banyak dan murah serta ekonomi makro yang stabil, sedangkan Korea Selatan memiliki kapasitas teknologi canggih, modal dan pengelolaan manajemen yang baik.

⁵ Profil Negara dan Kerjasama, <http://www.kemlu.go.id/seoul/Pages/CountryProfile.aspx?l=id>, diakses 8 Oktober 2015

Pada tahun 2007 untuk mewujudkan dan merealisasikan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati untuk membentuk Indonesia-Korea *Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC). Tujuan dibentuknya JTF-EC adalah untuk meningkatkan berbagai peluang kongkrit kerjasama bilateral dibidang ekonomi dan investasi. Kemudian di tahun 2011 JTF-EC direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) yang dilaksanakan di Bali. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan yang signifikan di kerjasama ekonomi antara kedua negara.⁶

Sejak dibentuknya Indonesia Korea – *Joint Task Force on Economic Cooperation*, investasi Korea Selatan di Indonesia semakin bertambah, di tahun 2006 nilai realisasi investasi sebesar USD 475.7 juta dan di tahun 2007 melonjak menjadi USD 627.7 juta dan memiliki 164 proyek. Kemudian di tahun 2008 nilai realisasi investasi Korea Selatan menurun menjadi USD 301.1 juta dan memiliki 182 proyek, hal ini disebabkan terjadinya krisis global di tahun tersebut.

Membandingkan investasi Korea Selatan ke Indonesia, investasi Indonesia ke Korea Selatan belum substansial, artinya negara Indonesia belum banyak melakukan investasi ke Korea Selatan. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir jumlah total investasi Indonesia di Korea sebesar USD 870 juta. Investasi Indonesia mengalir ke sektor jasa dan telah mencapai lebih dari 99 persen.⁷

⁶ Bilateral, <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-07-15-02-52/ekonomi>, diakses 16 Oktober 2015

⁷ Indonesia – Korea Joint Study Group For A Comprehensive Economic Partnership Agreement, hal 18

Seiring berjalannya waktu peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia terus meningkat, laporan BKPM menunjukkan bahwa pada tahun 2011 nilai realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia sebesar USD 1.218,7 miliar atau naik 6,1 persen dan memiliki 456 proyek dan menempati urutan ke 5 dengan nilai investasi sebesar USD 1,2 miliar atau naik 6,1%. Di tahun 2013, Korsel menempati urutan ke-4 namun di tahun 2014 menduduki peringkat ke-6 sebesar USD 1,1 miliar dari USD 2,2 miliar. Kemudian pada periode Januari-September 2015, trend realisasi investasi menempati urutan ke 4 dengan nilai Investasi USD 1,0 miliar dari total 1.529 proyek. Adapun urutan negara yang paling banyak melakukan investasi di Indonesia pada Januari-September 2015 yaitu Singapura sebesar USD 3,5 miliar, Malaysia sebesar USD 2,9 miliar, Jepang USD 2,4 miliar.⁸

Hal ini berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimana pada tahun 2011, BPS menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen dan total kumulatif PDB mencapai USD 850 miliar. Namun selama 4 tahun terakhir laju pertumbuhan Indonesia terus mengalami penurunan, ditahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 pesen, di tahun 2013 sebesar 5,78 persen⁹, kemudian ditahun 2014 sebesar 5,02 persen dan di kuartal III 2015 sebesar 4,73 pesen.¹⁰ Peningkatan atau penurunan investasi yang terjadi di Indonesia ini secara tidak langsung memperngaruhi perekonomian

⁸ Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara www.bkpm.go.id, diakses 10 oktober 2015

⁹ Tahun 2013 Ekonomi Indonesia Hanya 5,78 Persen, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/05/1221161/Tahun.2013.Ekonomi.Indonesia.Hanya.5.78.Persen>, diakses 16 Oktober 2015

¹⁰ Ekonomi Indonesia Triwulan III-2015 tumbuh 4,73 Persen Meningkat Dibanding Triwulan II-2015, <http://bps.go.id/brs/view/1200>, diakses 16 Oktober 2015

Indonesia. Melemahnya laju pertumbuhan bisa berimbas pada lesunya pembukaan lapangan kerja.

Investasi Korsel di Indonesia terdapat di berbagai sektor terutama pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankan dan perhotelan. Kemudian di tahun 2011, terdapat investasi yang bernilai miliaran US Dolar dari perusahaan-perusahaan besar Korsel seperti POSCO, Hankook Tire, Lotte Group dan Cheil Jedang Group di Indonesia. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor Korsel kepada Indonesia.¹¹

Di tahun 2011 juga Indonesia dan Korea Selatan membentuk Joint Study Group untuk lebih mempererat hubungan kerjasama kedua negara di bidang perdagangan dan investasi dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Pertumbuhan investasi Korea Selatan di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2013 terus mengalami peningkatan. Nilai realisasi di tahun 2013 mencapai USD 2.205,5 miliar di 807 proyek. Namun seiring berjalannya waktu di tahun selanjutnya trend realisasi investasi Korea Selatan mengalami penurunan. Terlihat bahwa nilai realisasi investasi menurun menjadi USD 1.126,6 miliar di 2014, kemudian pada bulan September 2015 peningkatan investasi ini belum terlihat lebih tinggi yang bernilai USD 1.011,7 miliar dari tahun sebelumnya.

¹¹ Kerjasama Ekonomi, <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-07-15-02-52/ekonomi>, diakses 16 Oktober 2015

Apabila melihat dari pembahasan awal hingga akhir, Maka dari itu penulis ingin mengetahui faktor apa yang menyebabkan investasi Indonesia dari Korea Selatan mengalami fluktuasi atau naik turun di tahun 2011-2015.

B. Rumusan Masalah

Faktor apa yang menyebabkan investasi Korea Selatan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2013-2015 ?

C. Kerangka Teori

Dalam hal ini konsep dan teori akan membantu menjelaskan permasalahan diatas. Konsep adalah abstraksi yang merepresentasikan sebuah objek, karakter sebuah objek, atau fenomena tertentu.¹² Salah satu fungsi dari konsep adalah mensistematisasikan ide-ide, persepsi-persepsi, dan simbol-simbol dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi.¹³

1. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang sering digunakan dalam menganalisis berbagai fenomena hubungan internasional. Kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai unsur untuk mengemukakan kebijakan yang

¹² Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin & Metodologi (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1990), hal 93-94

¹³ Ibid., hal 95

akan di ambil. Hans J. Margenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :¹⁴

“Kepentingan nasional setiap Negara adalah mengerjakan kekuasaannya, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.”

Menurutnya dalam mencapai kepentingan nasional diperlukan adanya kekuatan nasional. Kekuatan nasional tersebut meliputi geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.¹⁵

Sedangkan menurut Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalistas. Dalam hal ini, faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan dan investasi suatu negara dalam memperkuat sektor industri dan sebagainya.¹⁶

Kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan investasi tertera dalam sasaran strategis BKPM yaitu a. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan, dan

¹⁴ Ibid hal 140

¹⁵ Hans J. Morgenthau, Politik Antar Bangsa direvisi oleh Kenneth W. Thompson edisi V (Yayasan Obor Indonesia, 1990), hal 218

¹⁶ Daniel S. Papp, “Contemporary International Relation”: A Framework for Understanding, Second Editions (New York: Mac Millan Publishing Company, 1998), hal 29

pemantauan penanaman modal; b. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran; c. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal; d. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional; e. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah; f. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal; g. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.¹⁷

Inti dari kepentingan nasional Indonesia yaitu ingin meningkatkan investasi di berbagai bidang dari Korea Selatan. Konsep kepentingan nasional bisa di hubungkan dengan konsep kerjasama internasional. Keputusan yang akan di ambil oleh Indonesia dan Korea Selatan akan di hadapkan pada beberapa pilihan, yang dimana pasti mengandung keuntungan dan kerugian artinya Indonesia akan memilih pilihan yang sesuai dengan kepentingannya. Begitu pula dengan Korea Selatan yang juga menyetujui keputusan ini. Kesepakatan-kesepakatan yang diajukan oleh kedua negara akan di pertimbangkan, apakah negara tersebut sanggup untuk menyetujui atau tidak. Bagaimanapun, kepentingan nasional merupakan tolak ukur suatu negara untuk mengukur kebijakan yang akan di ambil.

2. Konsep Kerjasama Internasional

Konsep kerjasama merupakan konsep yang sering digunakan dalam menganalisis fenomena hubungan internasional. Kerjasama merupakan salah satu

¹⁷ Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2014, hal 5-6

unsur yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, politik, budaya yang dapat dijalin oleh satu negara dengan negara lainnya. Kerjasama yang terjalin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan terciptanya kerjasama antara kedua negara maka proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah akan cepat terselesaikan.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional ataupun global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih dari satu negara. Kedua pemerintah akan saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usulan dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya menurut K.J Holsti, kerjasama internasional bisa didefinisikan dalam beberapa pengertian, yaitu:¹⁸

- a. Pertama, kerjasama internasional merupakan pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara tersebut mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- b. Kedua, kerjasama internasional merupakan persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

¹⁸ K. J. Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II Terjemahan M. Tahrir Azhari (Jakarta: Erlangga, 1998), hal 652-653

Sesuai dengan pengertian kerjasama internasional diatas, terjalinnya hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia-Korea Selatan didasari oleh persetujuan atau masalah-masalah kedua negara dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan. Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum dipakai oleh sebuah negara namun juga menjadi landasan dasar dalam pembuatan keputusan. Sehingga pada dasarnya dengan terjalinnya kerjasama antara kedua negara maka akan terpenuhinya kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak.

Indonesia dan Korea Selatan menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam cakupan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk meningkatkan investasi asing langsung ke Indonesia serta meningkatkan ekspor-impor perdagangan kedua negara. Dalam perundingan IK-CEPA, masing-masing negara memberikan *initial request and offer list*, yang dimana Indonesia memberikan ajuan kepentingan nasional Indonesia dalam IK-CEPA begitupula sebaliknya, Korea Selatan memberikan ajuan kepentingan nasionalnya. Di perundingan putaran tujuh, Indonesia menginginkan Korea Selatan berinvestasi pada bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan makanan olahan tetapi tidak disetujui oleh Korea Selatan padahal Indonesia bersedia meringankan bea masuk 0% asal Korsel mau berinvestasi pada bidang-bidang yang disebutkan sebelumnya.

Hasil dari perundingan yan mengalami kebuntuan/ pemberhentian perundingan mengakibatkan di tahun 2014 investasi Korsel di Indonesia mengalami penurunan. Yang tadinya di tahun 2013, Korsel menduduki peringkat

ke-4 negara yang paling besar menanamkan modalnya di Indonesia turun menjadi peringkat ke-6 di tahun 2014.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis maka penulis mengambil hipotesa bahwa faktor yang menyebabkan investasi Korea Selatan di Indonesia mengalami penurunan tahun 2013-2015 adalah Indonesia Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) mengalami pemberhentian perundingan/ deadlock karena kepentingan nasional Indonesia dalam IK-CEPA tidak disetujui oleh pihak Korea Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan membagi jangka waktu antara 2011-2015. Tahun 2011 dipilih karena merupakan awal mula meningkatnya trend investasi Korea Selatan di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2015 dipilih sebagai batas akhir penelitian.

2. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini termasuk kedalam unit analisa negara-bangsa yaitu negara (Indonesia-Korea Selatan).

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Dengan cara;

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian.
- b. Mengkliping berita dari koran untuk mengetahui hasil apa saja yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia dan Korea Selatan.
- c. Mencari data-data, jurnal, majalah, dan browsing kesitus-situs terkait melalui internet.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis deskripsi analisis, dimana data-data atau informasi dan faka-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dan sistematis agar bisa berkolerasi diantara fakta-fakta tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Skripsi ini pada dasarnya merupakan karya tulis ilmiah sebagai hasil yang mendalam dan bersifat mandiri yang berisikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal diatas, penulis ingin menjelaskan serta menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan investasi Indonesia dari Korea Selatan mengalami fluktuatif atau naik turun di tahun 2011-2015 dengan menggunakan perspektif dan konsep tertentu dalam suatu penelitian yang

melibatkan operasionalisasi konsep. Serta pada akhirnya ingin menyelesaikan studi Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan dimana berisikan latar belakang, rumusan masalah, kerang kateori, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Penulis akan memaparkan Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan yang berisi tentang profil Indonesia, penanaman modal di Indonesia, kebijakan investasi serta perizinan penanaman modal di Indonesia; profil Korea Selatan, kebijakan ekonomi luar negeri; Hubungan bilateral antara Indonesia Korea Selatan, terjalannya hubungan diplomatik, dan terciptanya kesepakatan the Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century.

BAB III Penulis akan menjelaskan kerjasama investasi korea selatan-indonesia tahun 2011, yang terbagi pada sub bab pertama potensi investasi di indonesia dan sub bab kedua tentang perkembangan investasi korea selatan di indonesia tahun 2011-2015.

BAB IV Penulis akan memaparkan faktor yang menyebabkan investasi Indonesia dari Korea Selatan mengalami penurunan.

BAB V berisi tentang kesimpulan secara menyeluruh dari BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV.